

**ZAMAN RADIKAL: DINAMIKA GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA PADA MASA
KOLONIALISME 1912-1926**

Muhammad Tristan Shah Jahan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail: andititan93@gmail.com

Abstrak- Dalam lintasan sejarah, gerakan sosial di Indonesia banyak diwarnai oleh pengaruh ideologi politik serta peranan intelektual yang memelopori aksi tersebut. Tujuan dari penyusunan artikel ilmiah ini ialah untuk mengkaji dinamika gerakan sosial di Indonesia yang terjadi pada masa pergerakan nasional, ketika Indonesia memasuki era radikal dan non-kooperatif dalam melawan kolonialisme. Melalui pendekatan metode sejarah dan metode kepustakaan, dapat ditemukan suatu kebaruan mengenai pola gerakan sosial yang terdiri dari aksi pemogokan buruh dan pemberontakan bersenjata serta peranan tokoh intelektual dan pengaruh sosialisme yang menggerakkan elemen massa anti-kolonial.

Kata kunci: *Gerakan sosial, radikal, kolonialisme*

**RADICAL ERA: THE DYNAMICS OF SOCIAL MOVEMENTS IN INDONESIA
DURING COLONIALISM 1912-1926**

Muhammad Tristan Shah Jahan
Faculty of Social Science Education, Education University of Indonesia
e-mail: andititan93@gmail.com

Abstract-In the historical track, social movements in Indonesia were characterized by the influence of political ideology and the role of intellectuals who initiated the action. The purpose of this scientific article is to examine the dynamics of social movements in Indonesia that occurred during the national movement, when Indonesia entered a radical and non-cooperative era against colonialism. Through the historical method approach and the library research method, a new view can be found about the social movement pattern consisting of labor strikes and armed rebellions as well as the role of intellectual figures and the influence of socialism that mobilized anticolonial mass elements.

Keywords: *Social movement, radical, colonialisme*

Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, gelombang modernisasi dan pertumbuhan kaum-kaum intelektual mempengaruhi segala aspek kemasyarakatan di Indonesia pada masa kolonialisme. Organisasi yang dibentuk oleh kaum intelektual Bumiputera lahir sebagai stimulus perjuangan anti-kolonialisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa serta mewujudkan susunan masyarakat yang bebas dan sejahtera (Ichsan et al., 2023; Muhtarom, 2020; Yasin, 2021). Semula, perjuangan-perjuangan bergerak secara kritis-kooperatif dan dilakukan dalam ranah formal maupun informal. Namun seiring perkembangan waktu, gerakan-gerakan anti-kolonial dilakukan secara radikal melalui aksi-aksi fisik berupa pemogokan hingga pemberontakan yang dilakukan kaum buruh dan petani di sejumlah daerah.

Meletusnya gerakan-gerakan anti-kolonial disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi yang tidak menyejahterakan. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menekan rakyat agar membayar pajak yang tinggi untuk menutupi kenaikan pengeluaran pasca-perang dunia, pengeluaran pembangunan fisik serta sebagai upaya penghematan di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia. Perluasan kapitalisme barat serta penindasan elit borjuasi terhadap kaum proletar pun menjadi alasan kuat lahirnya gerakan sosial untuk menentang Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984).

Dengan demikian, melalui penyusunan artikel ilmiah ini dikaji secara lanjut mengenai dinamika gerakan sosial di Indonesia pada masa kolonialisme yang dilakukan oleh masyarakat proletar serta didukung oleh peranan kaum intelektual yang memiliki visi untuk kebebasan dan kemerdekaan, serta implikasinya yang dihasilkan terhadap tatanan politik, sosial dan ekonomi sehingga dapat menjadi pemahaman mengenai pola masyarakat dan struktur politik modern di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini ialah metode sejarah. Metode sejarah terdiri atas rangkaian prinsip dan aturan sistematis yang dirancang untuk membantu secara efektif dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, melakukan penilaian kritis terhadapnya dan menyajikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai, umumnya disusun dalam bentuk tulisan (Moleong, 2010). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku, artikel jurnal serta sumber-sumber yang sezaman. Sumber yang didapat kemudian diverifikasi secara internal dan eksternal, dilanjut dengan menyeleksi data yang paling valid untuk dijadikan sumber rujukan. Selanjutnya, sumber diinterpretasikan oleh penulis dengan cara menganalisis fakta yang diperoleh untuk mendapatkan hubungan peristiwa yang utuh dan sintesis yang dihasilkan dari proses penafsiran sumber disajikan dalam suatu bentuk penulisan sejarah atau historiografi (Garraghan, 1957; Sayuti, tanpa tahun).

Metode penelitian kepastakaan (*library research methods*) juga digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Metode tersebut menuntun dalam pengkajian suatu masalah penelitian dengan cara menyiapkan perlengkapan serta bibliografi kerja yang diperlukan, mencari masalah penelitian yang terdapat dari literatur yang telah disiapkan, kemudian segala kekurangan dan kelebihan dari semua temuan mengenai masalah penelitian dalam literatur dianalisis dengan kritis dan dikonstruksikan menjadi suatu kebaruan dari masalah penelitian (Zed, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Tumbuh kembangnya Politik Etis pada akhir abad ke-19 hingga menjelang abad ke-20 melahirkan kesadaran kebangsaan yang distimulasi oleh peranan intelektual Bumiputera. Politik Etis yang dicanangkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda mampu secara bertahap memperbaiki negeri jajahannya walaupun upaya Politik Etis merupakan bentuk tersirat dari sistem eksploitasi sumber daya alam dan penindasan masyarakat negeri jajahan (Fachruruzi, 2019; Setiawan, 2018; Susilo & Isbandiyah, 2018). Semisal dalam bidang pendidikan yang diperhatikan oleh Politik Etis, perluasan pendidikan kepada kaum Bumiputera begitu baik dilaksanakan namun masih terdapat

upaya diskriminasi ras dan tingkat ekonomi yang disalurkan melalui pembentukan sekolah berbasis ras dan stratifikasi sosial (Alrasyid, 2006).

Politik Etis juga mengakibatkan penetrasi kapitalisme secara intensif melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi yang ditandai dengan kemunculan perbankan dalam kurun waktu 1850- 1870 dan ekspor modal ke wilayah jajahan lain oleh para pengusaha-pengusaha yang dipatron oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Ekspansi mode produksi kapitalis menciptakan ketimpangan yang besar antara kaum Bumiputera dengan pengusaha-pengusaha swasta asing karena kekuatan produksi dan pasar di negeri jajahan begitu terbatas dan relatif kurang berkembang sehingga tak memadai untuk dijadikan pasar produk negeri induk, malahan distribusi modal yang dikirim ke negeri jajahan digunakan untuk persaingan di pasar global (Farid, 2024; Kartordirdjo, 1999).

Penetrasi kapitalisme mendorong eksploitasi besar-besaran terhadap tanah dan tenaga kerja serta menjadikan aspek-aspek sosial terkomersialisasi melalui pemakaian uang dalam bentuk kegiatan ekonomi yang oleh masyarakat di perdesaan dijadikan sebagai permasalahan dan hanya dengan menyewakan tanah serta menjual tenaga kerja maka dapat bisa memiliki uang tuk digunakan dalam kegiatan transaksi ekonomi. Berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta serta dibukanya banyak lahan perkebunan diyakini oleh para golongan humanis sebagai bentuk kebebasan bekerja dan berusaha yang dijamin oleh kemajuan dan kesejahteraan. Namun kenyataannya sama seperti semula, hanya saja ada upaya pergantian eksploitor dari yang feodal ke liberal (Kartordirdjo, 1999).

Penetrasi kapitalisme menciptakan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang kompleks. Mode produksi kapitalis mendominasi kegiatan mode produksi non-kapitalis sehingga mengubah hubungan sosial produksi serta menciptakan segregasi antara elite borjuasi serta kaum proletar, juga kemunculan golongan borjuasi kecil (*petty bourgeoisie*) yang merepresentasikan elite Timurasian dan Bumiputera dengan jumlah besar dibanding kaum buruh di perkotaan maupun di perdesaan, namun sama halnya dengan kaum proletar yang tidak memiliki alat produksi serta mendapatkan penindasan oleh elite borjuasi (Farid, 2024).

Berbicara mengenai gerakan sosial di Hindia Belanda pada abad ke-20 tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja yang sejatinya merangsang pergerakan kaum-kaum tertindas untuk melawan pemerintah kolonial. Perlu juga diidentifikasi keadaan sosial-politik yang dipengaruhi oleh kaum-kaum intelektual serta organisasi pergerakan dalam memperjuangkan gerakan anti-kolonial serta mewujudkan kebebasan dan kesadaran kebangsaan.

Gejala sosial politik Pemerintah Hindia Belanda diwarnai dengan pendemarkasian stratifikasi dan struktur kekuasaan. Kekuasaan birokrasi tradisional dilaksanakan secara tidak konsisten karena antara politik kolonial dengan kekuasaan tradisional mengingkari konsensus yang mengakar tentang manifesto dan kadar kekuasaan yang sah dan secara riil mengikat namun menimbulkan konflik. Kemerostan politik semacam ini terjadi di kalangan para bupati, sehingga kekuasaan bupati mengalami desakralisasi akibat melonggarnya ikatan operasional kedudukan antara bupati dengan keraton juga kemunculan elit-elit baru yang tidak sesuai dengan ketentuan adat dan bisa dianggap sebagai proses defeodalisasi masyarakat (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984).

Kondisi politik lokal akibat arus liberalisme dan Politik Etis yang mempengaruhi mengakibatkan pencairan batas segregasi sosial serta berkurangnya prestise kekuasaan tradisional yang simbolik. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk memperkenalkan dunia intelektual terhadap anak-anak dari kelas atas yang bebas dari tradisi yang mengikat serta dijamin dengan pandangan dunia baru yang modern. Pemikiran rasional anak-anak yang diperkenalkan dengan intelektualitas menyikapi keenggannya dalam menerima status dari kalangan bangsawan atau priayi dan mulai mencari alternatif baru dari status dan corak masyarakat.

Para priayi yang berintelektual tersebut menyikapi kondisi politik, sosial dan ekonomi di Hindia Belanda sebagai momentum dalam mengupayakan gerakan anti-kolonial serta mewujudkan struktur masyarakat yang egaliter (Bachtiar, 2018; Sudrajat, 2017; Sufyan, 2018). Secara penuh menekan bentuk-bentuk perjuangan lama berbasis fisik dan senjata dan ditransformasikan dalam bentuk perjuangan sistematis berbasis intelektual serta sosial-politik dengan mengkooptasi model-

model baru dalam sistem organisasi sebagai cara meminimalisir ketidakstabilan susunan masyarakat (Soekanto, 1982).

Pendidikan modern memberikan aksesibilitas bagi mobilitas dalam ranah sosial dengan segregasi rasial yang diterapkan dan diawasi oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dengan demikian, individu dari berbagai latar belakang tanpa memandang asal usulnya dapat meraih mobilitas sosial sejauh mana tingkat pendidikannya dan tak lagi terikat pada identitas kesukuan. Oleh karena itu, kategori kaum Bumiputera yang sebelumnya hanya memiliki makna dalam konteks dominasi kolonial menjadi dasar solidaritas bagi mereka yang mengenyam pendidikan modern. Mereka disebut sebagai “Kaum muda” yang maju dan modern serta membentuk solidaritas generasi, membedakan dengan “Kaum tua” yang belum mengenyam pendidikan modern dan masih terkungkung tradisi lama serta tekanan kolonial (Shirahisi, 1997).

Para kaum muda yang berintelektual tersebut tumbuh sebagai oposisi yang anti-kolonial. Mereka menyalurkan kekritisannya melalui organisasi sosial-politik, semisal Indische Partij yang didirikan pada tahun 1912 oleh Soewardi Soerjaningrat, Cipto Mangunkusumo dan Ernest Douwes Dekker yang menyuarakan kemerdekaan bagi Hindia serta mewujudkan masyarakat yang terbebas dari penjajahan. Namun pergerakannya masih belum teorganisir dengan efektif, namun pada 1917 Insulinde yang merupakan kelanjutan dari organisasi tersebut melakukan perorganisasian pemogokan buruh. Di tahun yang sama, Sarekat Dagang Islam (SDI) bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) yang tak lagi berdimensi untuk kegiatan ekonomi-perdagangan saja, melainkan tumbuh sebagai organisasi politik massa pertama di Hindia Belanda yang oleh Takashi Shirahishi disebut sebagai motor dunia pergerakan atau radikalisme rakyat (Farid, 2024).

Akhir tahun 1910an, gerakan sosial yang dilakukan oleh para intelektual dipengaruhi oleh paham sosialisme yang dibawa dan dikembangkan oleh ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*/Perhimpunan Demokrat Sosial Hindia) sejak tahun 1914 yang kelak pada tahun 1917 bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) (Hatama, 2022; Syatori, 2017). Hal tersebut merubah pergeseran perlawanan anti-kolonial yang semula bersifat loyal dan humanis, berubah menjadi anti-kolonial dan anti-kapitalisme yang ekstrem-revolusioner, dilakukan aksi-aksi konfrontasi terhadap Pemerintahan Kolonial sebagai proses akselerasi politik (Kartodirdjo, 1999).

Nuansa radikalisme merasuk dalam tubuh Sarekat Islam beriringan dengan proses infiltrasi sosialisme ke dalam tubuh organisasi yang membuat dualisme antara SI merah dengan SI putih. Tendensi kiri dan radikal mulai terlihat dalam tubuh SI sejak Semaoen memimpin SI Semarang pada tahun 1917 yang mengubah arah pergerakan SI menjadi lebih revolusioner. Sosialisme di Hindia Belanda sebenarnya lebih merupakan gerakan perlawanan terhadap penindasan daripada gerakan yang bersifat doktriner. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman yang kuat terhadap doktrin Marxisme di kalangan sosialis di Hindia Belanda. Penerimaan terhadap Sosialisme di Hindia disebabkan oleh meningkatnya kesadaran proletar akibat tekanan sosial, politik, dan ekonomi yang dilakukan oleh kaum kapitalis yang dilindungi oleh kekuasaan kolonial (Bakri, 2015).

Keberadaan tokoh-tokoh pelopor pergerakan menjadi hal utama dalam membentuk tindakan sosial yang mempengaruhi perubahan sosial walaupun tokoh yang memelopori perubahan bukan satusatunya penentu dalam gerak perubahan, tetapi aktor menjadi instrumen penting yang membantu gerak perubahan sejarah. Keberadaan Semaoen, Darsono, Mas Marco Kartodikromo dan Haji Misbach begitu penting dalam menyelami gerakan sosial di Indonesia pada kurun waktu 1917-1926 yang bersifat radikal dan bernuansa kiri, terimplementasikan dalam bentuk aksi pemogokan buruh dan pemberontakan kaum petani (Schroeder, 1992).

Dalam kurun waktu 1917- 1920, pecah berbagai aksi pemogokan buruh dan pemberontakan petani. Di Surakarta aksi pemogokan kaum buruh dan pemberontakan petani digerakan oleh kelompok anti-SI seperti SATV, Insulinde, Toenggoal Boedi, Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemipoetera (PPPB), dan Perkoempoelan Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) Afdeling Surakarta yang berhaluan komunis. Aksi tersebut digawangi oleh Cipto Mangunkusumo dari Insulinde dan Haji Misbach dari Sarekat Islam merah. Di Semarang pun pecah aksi pemogokan besar-besaran dari buruh VSTP (*Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel*) yang dipimpin oleh Semaoen. Tujuan gerakan tersebut ialah untuk menentang penindasan serta memperjuangkan

kelas, selain itu juga sebagai bentuk reaksi non-kooperatif pada Sarekat Islam pimpinan HOS Tjokroaminoto yang terlalu loyal dan humanis dalam menghadapi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Bakri, 2015; Farid, 2024; Shiraishi, 1997).

Kejadian serupa terjadi di Yogyakarta ketika pecah kerusuhan di pabrik gula Padokan karena upah mereka terus dipangkas oleh pihak pabrik. Seorang priayi reformis bernama Soerjopranoto bersama Soemoharjono membentuk *Arbeidsleger* (tentara buruh) yang tumbuh menjadi *Personeel Fabriek Bond* (PFB), mengakomodir gerakan pemogokan buruh di beberapa pabrik gula yang menuntut kesetaraan hak antara pekerja Belanda dan pekerja Bumiputera, serta meningkatkan kondisi kerja, jam kerja yang sehat selama delapan jam, memberikan libur dengan bayaran penuh setiap minggu, dan memberikan tambahan bayaran untuk kerja lembur. Gerakan buruh di beberapa *afdeling* PFB dinilai sukses berkat agitasi-propaganda serta penanaman prinsip Adhi Dharma yang dilakukan oleh Soerjopranoto dkk, maka ia senantiasa dijuluki sebagai ‘raja pemogokan’ (Shirahisi, 1997).

Secara berkesinambungan, gerakan sosial untuk menentang ekses kekuasaan kolonial Hindia Belanda dilakukan lebih ekstrem dan represif. Partai Komunis Indonesia melalui tokoh-tokoh intelektualnya mengompromi petani dan buruh untuk melawan pemerintah kolonial yang sudah tak mampu memberikan saluran-saluran wajar dalam merekayasa kekuatan perubahan di dalam masyarakat, malahan kebuntuan tersebut ditanggapi dengan kebijakan-kebijakan yang menindas, eksploitatif dan konfrontatif. Resolusi Prambanan pada tahun 1925 menjadi titik tolak gerakan emansipasi sosial, namun pesimisme yang menghambat jalannya resolusi mengakibatkan perpecahan dalam tubuh partai (Zed, 2004).

Pergolakan di Banten dan Sumatra barat ditanggapi dengan dua pandangan yang saling kontradiktif. Tan Malaka menolak resolusi Prambanan karena perencanaan pemberontakan yang dilakukan oleh Alimin serta Muso masih prematur dan kurang matang (*de tijd nog niet rijp*) baik secara praktis maupun teoritis. *True revolution* yang Tan Malaka tawarkan ialah kematangan memahami situasi negeri dan kondisi organisasi, bukan mengharapkan ketergantungan dana dari Uni Soviet yang merupakan bentuk kelemahan fundamental dalam merencanakan suatu kekerasan politik. Tan Malaka berharap revolusi berjalan sesuai dengan kaidah ajaran marxisme, namun hal tersebut diindahkan dan resolusi tetap dijalankan meskipun tak realistis dan terkesan utopis (Zed, 2004).

Maka dari itu, proses gerakan sosial yang membunyah di Sumatra Barat dan Banten mengalami ketidakefektifan. Di Sumatra Barat, pergerakan meletus di daerah Sawahlunto dan Silungkang dengan sasaran merebut kantor pemerintahan serta membunuh pegawainya, menyerang societiet (klub masyarakat kelas atas), menyerang tambang batu bara serta membunuh pegawainya serta menyerang penjara dan membebaskan para tahanan. Sedangkan di Banten, pergerakan terjadi di pasar-pasar seperti di Serang, Pandeglang, Menes, Labuan dan Caringin, mereka menyerang kompleks para asisten wedana namun berhasil diredam oleh aparat keamanan (Williams, 2003; Zed, 2004).

Gerakan-gerakan sosial yang dikonstruksikan oleh Partai Komunis Indonesia dalam suatu resolusi pada 1925 memanglah sebuah kesadaran tinggi untuk melawan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi, apabila melihat kondisi gerakan pemberontakan di Banten maupun di Sumatra Barat masih terdapat kekurangan dalam mengorganisir kekuatan massa yang kompeten, memantapkan mental para pemberontak serta memperkirakan persenjataan dan jumlah kekuatan massa. Alhasil, pemberontakan yang didesain secara revolusioner dengan cita-cita untuk menghancurkan ekses kolonialisme hanyalah sebatas kesembronoan elite politik dengan kemustahilan pengimplementasian agendanya yang telah dirumuskan.

Akhir dari pemberontakan pada 1926 ialah pelarangan organisasi buruh dan Partai Komunis Indonesia. Para pemimpin serta aktivis dari seksi Surakarta, Moe’alimin dan *Raad van Vakbonden* dibuang ke Boven Digul. Di sana mereka didera ancaman penyakit malaria dan tantangan alam yang mematikan, salah satu contohnya dialami oleh Mas Marco Kartodikromo yang tewas akibat terserang penyakit malaria pada 1932 juga Mangoenatmojo yang tewas dimakan buaya pada tahun 1927. Tahanan lainnya seperti Haroenrasjid, Sismadi Sastrosiswojo, dan Ahmad Dasoeki dapat bertahan hidup sepanjang pembuangan di Digul dan akhirnya kembali ke Surakarta di masa revolusi (Shiraishi, 2001).

Simpulan

Penetrasi kapitalisme asing dan akumulasi modal menciptakan penindasan terhadap kaum Bumiputera. Kelas-kelas sosial semakin mempertajam kesenjangan dalam kehidupan masyarakat multietnis di Indonesia kala itu. Namun, berkat kesadaran kaum muda intelektual dapat bangkit suatu kesadaran anti-kolonialisme serta tumbuhnya semangat kebangsaan.

Semula, gerakan-gerakan sosial bersifat kooperasi dilancarkan dalam melawan pemerintah kolonial. Namun, karena perjuangan tersebut malah menimbulkan loyalitas dan gejala yang lambat maka pola kooperasi diganti menjadi pola ekstrem dan berorientasi pada pergerakan yang radikal. Aksi pemogokan dan pemberontakan yang dilakukan kaum buruh dan petani dilancarkan di beberapa daerah untuk menuntut hak keadilan dalam pekerjaan serta pemberian penghidupan yang layak dari pemerintah.

Gerakan-gerakan yang radikal tersebut didukung oleh paham sosialisme-marxisme yang dikembangkan melalui Partai Komunis Indonesia. Salah satu bentuk kontribusinya adalah mendalangi aksi pemogokan di berbagai daerah serta aksi pemberontakan yang masif dilakukan di Banten dan Sumatra Barat walaupun pengorganisasian massa tidak stabil dan kurang siap, sehingga aksi pemberontakan dapat dipadamkan dengan mudah oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, M. H. (2006). ZAMAN BERGERAK (Analisis Historis tentang Awal Perjuangan Politik Indonesia Masa Kolonialisme 1912 – 1926). *Jurnal Madani Edisi I*, 17-30.
- Bakri, S. (2015). *Gerakan Komunisme Islam di Surakarta 1914-1942*. Yogyakarta: LKiS.
- Bachtiar, T. A. (2018). *Lajur-lajur pemikiran Islam: Peta pergulatan intelektual Islam Indonesia abad ke-20 dan awal abad ke-21*. JSP Publishing.
- Fachrurozi, M. H. (2019). Politik etis dan bangkitnya kesadaran baru pers bumiputra. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 2(1).
- Farid, H. (2024). *Perang Suara: Bahasa dan Politik Pergerakan*. Depok: Komunitas Bambu.
- Garraghan, G. J. (1957). *Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Hatama, D. A. G. P. (2022). PERKEMBANGAN KOMUNISME DI INDONESIA TAHUN 1914-1927. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 7(1), 57–72.
- Ichsan, M., Maulia, S. T., Hendra, H., & Salam, M. (2023). Budi Utomo: Pemantik Pergerakan Nasional. *Jurnal EduSosial*, 3(1), 96–106.
- Kartodirdjo, S. (1999). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhtarom, H. (2020). Wujud Persamaan dan Perbedaan Nasionalisme Abad 20 dan Abad 21 di Indonesia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 3(2).
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(1), 12–25.

- Sudrajat, A. (2017). KH Ahmad Rifa'i Dari Kalisalak Pekalongan dan Gerakan Protes Sosial Abad 19. *Nd [https://Staffnew. Uny. Ac. Id/Upload/131862252/penelitian/KH+ Ahmad+ Rifai+ Dan+ Gerakan+ Ptotes+ Sosial. Pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/penelitian/kh+ahmad+rifai+dan+gerakan+ptotes+sosial.pdf)*.
- Sufyan, F. H. (2018). *Menuju lentera merah: gerakan propagandis komunis di Serambi Mekah 1923-1949*. UGM PRESS.
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403.
- Syatori, A. (2017). Jejak Marxisme di Indonesia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(1).
- Sayuti, H. (tanpa tahun). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- Schroeder, R. (1992). *Max Weber and the Sociology of Culture*. London: Sage.
- Shiraishi, T. (1997). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa. 1912-1926*. Jakarta: Grafiti.
- Shiraishi, T. (2001). *Hantoe Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonia!* Yogyakarta: LKiS.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Williams, M. C. (2003). *Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Yasin, A. (2021). Keterlibatan Persatoean Perkoempoelan Kaoem Boeroeh (PPKB) dalam Gerakan Buruh di Jawa 1919-1921. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 12(1).
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zed, M. (2004). *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatra Barat*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.